

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Buku

Pitlo,A, Arief M.Isa, Kasdrop.(1979). *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M. Isa Arief). Edisi 1.* Jakarta: Jakarta Intermasa.

Abdulrahman, Riduan Syahrani. (1978). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia.* Bandung: Alumni.

Bakri, A.Rahman, Sukardja Ahmad.(1981). *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW.* Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: UII Press.

Barry, N.Dahlan Al. (1994). *Kamus Modern Bahasa Indonesia,* Yogyakarta: Arloka.

- Ibrahim, Johny.(2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Jamaluddin. (2016). *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir.(2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulia, Siti Musda. (1999). *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan gender.
- Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mulyadi. (2022). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Undip Press Semarang.
- Mursalin, Supradi. (2007). *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjohamidjojo, Martiman.(2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Setiani, Eni dan Muhammad Hamzah. (2007). *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami sebagai sebuah Fenomena) Cet I*, Jakarta: Citera Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemiyati. (2006). *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

- Subekti. (1990). *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cet Ke-1*. Jakarta: Inter Masa.
- Waluyo, Bambang. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

- Akbar ,H.Ahmad Roza'I. (2019). Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas. *Jurnal Iaitf Dumai*. 1(2).
- Annisa, Teuku Yudi Afrizal, & T. Saifullah. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), IV*.
- Astuti, Puput Dwi, M.Muhtarom, dan Hafid Zakariya. (2023). Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pihak Laki-Laki di Pernikahan Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh). *Jurnal Bevinding*. 1(1)
- Damanik, Janner. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5.
- Hardhani, Vika Mega dan Mulyadi Yunanto. (2016). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/PA. Smg). *Diponegoro Law Journal*. 5(3)

- Kurniawan, Rafly, Bruce Anzward, dan Johan's Kadir Putra. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami. *Jurnal Lex Suprema*. 2(1)
- Murni, & Mega Naurin Nisa. (2023). Permohonan Isbat Nikah Bagi Poligami yang Tidak Dicatatkan . *Rechtdee*, 18.
- Putra, Merdi Aditya, Iga Pricilia, dan Hika Deriya Putra. (2021). Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas. *Indonesian Notary*. 3(2).
- Salsabiela, Riskhi dan Rahandy Rizky Prananda. (2023). Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 5(2)
- Siregar, Muhammad Yusuf. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri . *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 5.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Nasya Nur Azizah, & Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata . *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1.
- Suryaningsih, Fitri Sri, & Amal Hayati. (2023). Peran Dan Kedudukan Kua Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn) . *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.
- Tami, Rusli. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Universitas Bandar Lampung (UBL)*, 8.

- Uraidy, Ali dan Devi Firmansyah. (2018). Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1447/PDT.G/2021/PA.SM). *Jurnal Ilmiah FENOMENA*. 16 (1)
- Wijaya, Fitri Ayu Sari. (2020). Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671K/Ag/2015). *Doktrina: Journal of Law*.

Website

- Afra, Fida. “5 Jenis Teknik Pengumpulan Data Beserta Pengertiannya”, (<https://kumparan.com/ragam-info/15-contoh-footnote-dari-internet-dan-susunannya-21QYdqeH5qp/1> diakses pada Selasa, 12 November 2024 jam 19.02 WIB)
- Agustin, Erni/ HukumOnline.com. (2024, 6 Agustus). *Akibat hukum Perjanjian Yang Dibuat Dengan Itikad Buru*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pihak-dalam-perjanjian-beritikad-buruk-lt4ecd917f0a1ce/>
- Humas dan Kerja Sama/ BPHN.GO.ID. (2025, 3 Februari). *Jelang Berlakunya KUHP Baru Kementerian Hukum Intensifkan Sosialisasi*, diakses pada tanggal 19 Maret 2025. <https://bphn.go.id/berita-utama/jelang-berlakunya-kuhp-baru-kementerian-hukum-intensifkan-sosialisasi#:~:text=Minggu%20lalu%2C%20Kementerian%20Hukum%20juga.berlaku%20mulai%2002%20Januari%202026>.

Melati, Wely Putri. “Zoon Politicon Dalam Kaitannya Dengan Hukum Perdata”,<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15880/Zoon-Politicon-dalam-kaitannya-dengan-Hukum-Perdata.html> (diakses pada Minggu, 20 Oktober, pukul 17.46 WIB)

Munawaroh, Nafiatul/ HukumOnline.com. (2024, 25 Oktober). *Cara Membuat Surat Gugatan Perdata*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871/>

PenasihatHukum.com. *Mengulas Jenis-Jenis Gugatan dalam Hukum Perdata*. Diakses pada tanggal 21 Maret 2025
<https://www.penasihatHukum.com/mengulas-jenis-jenis-gugatan-dalam-hukum-acara-perdata>